

## KESEJAHTERAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN: SEBUAH ANALISIS TEORETIS MULTIDIMENSI

Musyrifah Zidni Baroroh<sup>1\*</sup>, Moh. Sugeng Solehuddin<sup>2</sup>, Abdul Khobir<sup>3</sup>, Slamet Untung<sup>4</sup>, Sopiah<sup>5</sup>  
Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

\*Corresponding author email: [musyrifah.zidni.baroroh25011@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:musyrifah.zidni.baroroh25011@mhs.uingusdur.ac.id)

### Article History

Received: 21 April 2026

Revised: 22 May 2026

Published: 30 May 2026

### ABSTRACT

*The low welfare of Islamic Religious Education (PAI) teachers in Indonesia represents a systemic paradox. Recent national reports indicate that a significant proportion of non-civil servant teachers receive salaries below the regional minimum wage, highlighting a structural welfare gap. This study aims to (1) map the welfare problems of PAI teachers in financial, psychological, and professional dimensions during the 2021–2026 period, (2) analyze the implications of welfare deficits on the quality of educational processes and outcomes, and (3) formulate integrative policy solutions based on modern management theory and Maqasid al-Shariah. This study employs a systematic library research design by reviewing 35 scholarly articles indexed in Sinta and Scopus databases published between 2021 and 2026. The inclusion criteria include relevance to teacher welfare, educational quality, and Islamic education, while exclusion criteria include non-peer-reviewed sources and outdated publications. The data are analyzed qualitatively using a descriptive method, applying the frameworks of Motivation–Hygiene Theory (Herzberg), Maqasid al-Shariah Theory (Al-Shatibi), and Total Quality Management (TQM). The findings indicate that welfare deficits are primarily associated with financial insecurity, excessive administrative workload, and limited professional development opportunities. These conditions significantly affect pedagogical performance and reduce the effectiveness of character education.*

**Keywords:** PAI Teacher Welfare, Educational Quality, Maqasid Al-Shariah, Motivation–Hygiene Theory, TQM.

Copyright © 2026, The Author(s).

**How to cite:** Baroroh, M. Z., Solehuddin, M. S., Khobir, A., Untung, S., & Sopiah, S. (2026). Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan: Sebuah Analisis Teoretis Multidimensi. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(2), 857–867. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i2.6168>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG

Di tengah arus globalisasi dan disrupsi digital yang masif, masyarakat dunia menghadapi krisis moralitas dan degradasi etika yang kompleks. Berbagai survei internasional menunjukkan bahwa karakter generasi muda seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat mengalami penurunan signifikan seiring dengan penetrasi budaya digital yang tidak terbendung (Hapsari, 2024; Grove, 2024). Dalam konteks Indonesia, lembaga pendidikan, khususnya sekolah umum, dipandang memiliki tanggung jawab besar untuk membendung arus dekadensi moral melalui penguatan pendidikan agama. Di sinilah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang mandat sosial yang sangat strategis: sebagai benteng pertahanan karakter bangsa sekaligus pemandu spiritualitas generasi muda.

Namun, terdapat anomali sosial yang mencengangkan. Ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap kesalehan dan perilaku siswa tidak dibarengi dengan perhatian sistemik terhadap kondisi kehidupan para pengajarnya. Guru PAI sering kali diposisikan sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa" dalam arti yang peyoratif di mana pengabdian moral mereka dianggap sebagai kewajiban yang terpisah dari hak-hak ekonomi dan kesejahteraan hidupnya (Saidah & Sholikah, 2026). Paradoks ini menciptakan ketimpangan mendasar antara beban tanggung jawab dan imbalan yang diterima, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan pendidikan karakter nasional.

Fenomena "prekariat" kelas pekerja dengan kerentanan finansial yang ekstrem kini nyata menghinggapi profesi guru PAI, terutama bagi mereka yang berstatus non-ASN dan honorer. Data lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan upah dan

minimnya jaminan sosial bagi guru agama masih menjadi isu krusial yang belum terpecahkan (Ilmiyah et al., 2021; Martini, 2025). Secara sosiologis, tekanan ekonomi ini memaksa guru untuk melakukan side hustling atau pekerjaan sampingan guna menutupi kebutuhan dasar, seperti menjadi pedagang, ojek online, atau buruh lepas (Sari et al., 2024). Akibatnya, fokus dan energi yang seharusnya tercurah sepenuhnya untuk pengembangan pedagogis menjadi terfragmentasi oleh tuntutan bertahan hidup di tengah himpitan inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.

Secara simultan, transisi menuju Kurikulum Merdeka membawa tantangan administratif dan teknis yang sangat besar bagi guru PAI. Mereka dituntut untuk menguasai teknologi pendidikan, melakukan asesmen diagnostik yang mendalam, merancang pembelajaran berdiferensiasi yang inovatif, serta mendokumentasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) (Alhafiz, 2025; Mustaqim, 2025). Ironisnya, beban kerja yang kian berat ini sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan insentif atau dukungan kesehatan mental. Fenomena digital burnout pada guru PAI (Rahman, 2025; Lestari, 2024) menjadi indikator bahwa kesejahteraan psikologis mereka terabaikan, padahal kesehatan mental guru adalah fondasi utama bagi terciptanya suasana kelas yang kondusif, inspiratif, dan transformatif.

Kesejahteraan guru memiliki korelasi linier dan signifikan terhadap mutu pendidikan. Guru yang berada dalam tekanan finansial dan psikologis cenderung terjebak pada metode mengajar yang monoton dan formalitas administratif belaka. Tanpa kesejahteraan yang memadai, motivasi intrinsik untuk melakukan inovasi

pedagogis akan terkikis, yang pada gilirannya menurunkan kualitas literasi keagamaan dan pembentukan akhlak siswa (Hutasuhut et al., 2025; Setiani & Wakinah, 2025). Dengan kata lain, rendahnya mutu pendidikan PAI bukan hanya soal kurikulum yang lemah atau metode yang ketinggalan zaman, melainkan sering kali berakar dari ketidakmampuan sistem dalam menjamin stabilitas hidup sang pendidik sebagai aktor utama transformasi nilai.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru, meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan, belum sepenuhnya menjangkau guru non-ASN dan honorer (Wahyuni, 2026; Daryanto, 2023). Selain itu, implementasi tunjangan kinerja sering kali tidak berbasis pada data riil kebutuhan guru di lapangan (Fauzi, 2024). Kesenjangan antara kebijakan dan realitas ini menciptakan ruang kritis yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama dengan menggunakan kerangka teoretik yang holistic tidak hanya manajemen modern tetapi juga perspektif etis-religius seperti Maqasid Syariah.

Sejauh ini, kajian tentang kesejahteraan guru PAI masih banyak dilakukan secara parsial. Beberapa penelitian fokus pada aspek finansial semata (Ibrahim, 2025; Zuhri, 2026), sementara yang lain menyoroti beban psikologis tanpa menghubungkannya secara eksplisit dengan mutu output pendidikan (Priyono, 2024; Mulyasa, 2024). Belum banyak penelitian yang secara simultan mengintegrasikan tiga kerangka besar: Teori Motivasi-Higiene (Herzberg) untuk membaca faktor kepuasan/ketidakpuasan kerja, Teori Maqasid Syariah (As-Syatibi) untuk menilai pemenuhan hak-hak dasar pendidik dalam perspektif Islam, serta Total Quality

Management (TQM) untuk merumuskan solusi sistemik yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui pendekatan multidisiplin yang memadukan psikologi manajemen, filsafat hukum Islam, dan manajemen mutu pendidikan. Dengan menggunakan metode studi pustaka (library research), penelitian ini bertujuan untuk mensintesis berbagai temuan dari jurnal-jurnal terkait periode 2021–2026, serta menarik benang merah antara kebijakan pemerintah, realitas ekonomi guru, dan standar mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret aktual problematika kesejahteraan guru PAI di Indonesia dalam dimensi finansial, psikologis, dan profesional menurut tinjauan literatur terkini (2021–2026)?
2. Bagaimana implikasi rendahnya tingkat kesejahteraan guru PAI terhadap mutu proses dan output pendidikan agama di sekolah?
3. Bagaimana formulasi solusi kebijakan dan model kesejahteraan ideal bagi guru PAI dalam perspektif Maqasid Syariah dan Manajemen Pendidikan Modern (TQM)?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membedah problematika kesejahteraan guru PAI serta dampaknya terhadap mutu pendidikan dengan merujuk pada literatur otoritatif dan data jurnal terbaru; (2) menganalisis implikasi defisit kesejahteraan terhadap mutu pendidikan dalam kerangka Maqasid Syariah; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis integrasi teori.

Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan Islam dan

psikologi pendidikan. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk mereformasi sistem tata kelola kesejahteraan guru. Dengan menjamin kesejahteraan guru PAI, bangsa ini sejatinya sedang melakukan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas moral dan intelektual generasi masa depan di tengah tantangan zaman yang kian berat.

Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru honorer di Indonesia menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak (Martini, 2025; Sari et al., 2024). Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan struktural antara tuntutan profesional guru dan pemenuhan hak kesejahteraannya.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas kesejahteraan guru, sebagian besar masih bersifat parsial, hanya menyoroti aspek finansial atau psikologis secara terpisah (Ibrahim, 2025; Priyono, 2024). Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif manajemen modern dan nilai-nilai Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi tiga kerangka teoretis utama, yaitu Teori Motivasi-Higiene (Herzberg), Maqasid Syariah (As-Syatibi), dan Total Quality Management (TQM), dalam menganalisis kesejahteraan guru PAI secara multidimensi. Penelitian ini juga menawarkan model konseptual integratif sebagai dasar rekomendasi kebijakan pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library

research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kesejahteraan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) serta implikasinya terhadap mutu pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk membangun sintesis konseptual dan analisis teoretis multidimensi berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, buku referensi, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan penelitian yang relevan, dengan batasan periode terbitan tahun 2021–2026 guna menjaga aktualitas dan relevansi kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi secara kritis sumber-sumber yang sesuai dengan fokus penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, serta penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan hubungan antar konsep. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka Teori Motivasi-Higiene (Herzberg) untuk mengkaji aspek kepuasan dan ketidakpuasan kerja guru, Teori Maqasid Syariah (As-Syatibi) untuk menilai pemenuhan hak-hak dasar pendidik dalam perspektif Islam, serta Total Quality Management (TQM) untuk merumuskan solusi sistemik dalam peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner dan normatif-konseptual, dengan mengintegrasikan perspektif manajemen pendidikan, psikologi, dan studi Islam. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan

triangulasi sumber dan kritik sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang kredibel sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan desain *systematic literature review* dengan mengacu pada prosedur identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Sumber data diperoleh dari database Google Scholar, Sinta, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci: "teacher welfare", "PAI teacher", "educational quality", dan "Islamic education".

Dari hasil pencarian awal sebanyak 75 artikel, dilakukan proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi sehingga diperoleh 35 artikel yang dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data melalui pengelompokan tema, (2) penyajian data dalam bentuk sintesis naratif, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar konsep. Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian yang relevan dan kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika kesejahteraan guru PAI di Indonesia bersifat multidimensi, namun akar utamanya terletak pada ketidakmampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) pendidik. Fenomena "prekariat" bukan lagi anekdot, melainkan realitas terstruktur yang dialami oleh sebagian besar guru PAI non-ASN dan honorer. Ilmiah et al. (2021) mendokumentasikan bahwa guru PAI di daerah terpencil sering kali menerima honor di bawah upah minimum regional (UMR), bahkan ada yang hanya mendapat Rp 150.000–300.000 per bulan. Kondisi ini

memaksa mereka untuk tinggal dalam keterbatasan ekstrem, tanpa jaminan kesehatan atau hari tua (Martini, 2025).

Dalam kerangka Teori Motivasi-Higiene Frederick Herzberg, kondisi ini merupakan kegagalan total pada faktor hygiene khususnya aspek gaji, tunjangan, dan keamanan kerja. Herzberg (dalam naskah asli, hlm. 3–4) menegaskan bahwa faktor hygiene bersifat *dissatisfier*: jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan ketidakpuasan ekstrem; namun jika terpenuhi sekalipun, hanya akan membuat guru "tidak lagi tidak puas", bukan serta merta termotivasi. Dengan kata lain, guru PAI yang hidup di bawah garis kemiskinan struktural berada dalam zona *extreme dissatisfaction* yang menghancurkan fondasi psikologis mereka.

Lebih lanjut, tekanan ekonomi ini memicu perilaku *side hustling* (pekerjaan sampingan) sebagai strategi bertahan hidup. Sari et al. (2024) menemukan bahwa lebih dari 60% guru honorer di sektor swasta memiliki pekerjaan tambahan di luar jam mengajar, seperti berjualan daring, menjadi sopir, atau buruh harian. Akibatnya, energi kognitif dan emosional yang seharusnya dicurahkan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen diagnostik, atau membimbing karakter siswa menjadi terfragmentasi. Guru datang ke sekolah dalam keadaan lelah secara fisik dan mental, sehingga kualitas interaksi pedagogis di kelas menurun drastis.

Di sisi lain, implementasi Kurikulum Merdeka membawa beban administratif dan teknologis yang tidak proporsional. Guru PAI dituntut untuk menguasai platform digital, membuat modul ajar yang terdiferensiasi, mendokumentasikan proyek P5 (Profil Pelajar Pancasila), serta melakukan asesmen diagnostik awal dan akhir (Alhafiz, 2025; Mustaqim, 2025). Namun, beban ini tidak diimbangi dengan

peningkatan insentif atau pelatihan yang memadai. Rahman (2025) melaporkan fenomena digital burnout di kalangan guru PAI perkotaan, di mana kelelahan akibat penggunaan teknologi secara terus-menerus tanpa dukungan psikologis menyebabkan depresi, kecemasan, dan penurunan performa kerja. Lestari (2024) menambahkan bahwa guru PAI honorer sama sekali tidak memiliki work-life balance; waktu istirahat dan kebersamaan keluarga dikorbankan untuk memenuhi tuntutan administrasi dan pekerjaan sampingan.

### 1. Analisis Maqasid Syariah: Ancaman terhadap Hifz al-Mal, Hifz al-Nafs, dan Hifz al-Aql

Berdasarkan hasil sintesis 35 artikel yang dianalisis, ditemukan bahwa permasalahan kesejahteraan guru PAI dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu finansial, psikologis, dan profesional.

Jika dibaca dengan kacamata Maqasid Syariah (As-Syatibi), problematika di atas bukan sekadar isu manajemen SDM, melainkan bentuk pengabaian terhadap tiga pilar daruriyyat sekaligus.

Pertama, hifz al-mal (perlindungan harta) terancam secara sistemik. Upah di bawah standar hidup layak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi ekonomi pendidik. Dalam Islam, harta (mal) adalah sarana untuk menjaga martabat manusia (karamah) dan memungkinkan seseorang beribadah dengan tenang. Ketika guru PAI hidup dalam kemiskinan struktural, martabat mereka sebagai pengemban risalah agama ikut tercoreng. Zuhri (2026) dalam tinjauan fikih ijarah (sewa-menyewa jasa) menegaskan bahwa upah yang tidak

setimpal dengan beban kerja adalah bentuk kezaliman (zulm) yang dilarang syariat.

Kedua, hifz an-nafs (perlindungan jiwa) terancam oleh beban kerja berlebih dan digital burnout. As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat (sebagaimana dikutip dalam naskah asli, hlm. 6–7) melarang pembebanan yang melampaui batas kemampuan (taklif ma la yutaq). Sistem pendidikan yang menuntut guru PAI untuk menguasai teknologi, memenuhi administrasi rumit, sekaligus menjadi teladan moral tanpa dukungan kesejahteraan yang memadai adalah bentuk ketidakadilan. Stres kronis yang dialami guru dapat berujung pada gangguan kesehatan mental, bahkan bunuh diri dalam kasus ekstrem. Padahal, perlindungan jiwa (hifz an-nafs) adalah prioritas tertinggi kedua setelah agama dalam hierarki Maqasid.

Ketiga, hifz al-'aql (perlindungan akal) terhambat oleh stagnasi profesional. Akses terhadap sertifikasi PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang panjang, berbelit, dan mahal (Wahyuni, 2026) serta minimnya pelatihan berkelanjutan mengakibatkan intelektualitas guru PAI tidak berkembang. Padahal, akal harus terus dipelihara melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Guru yang terjebak dalam rutinitas administratif tanpa ruang untuk belajar dan berefleksi akan kehilangan daya kritis dan kreativitasnya. Akibatnya, literasi keagamaan yang disampaikan kepada siswa menjadi dangkal, tekstual, dan tidak kontekstual.

### 2. Implikasi Rendahnya Kesejahteraan terhadap Mutu Pendidikan

Implikasi paling langsung dari defisit kesejahteraan adalah menurunnya mutu proses pembelajaran. Guru yang kelelahan secara finansial dan mental cenderung memilih jalur paling mudah: mengajar

dengan metode ceramah monoton, memberikan tugas yang bersifat hafalan, dan menghindari inovasi seperti problem-based learning atau project-based learning. Hutasuhut et al. (2025) dalam studi korelasional menemukan bahwa rendahnya kesejahteraan guru berkorelasi negatif dengan tingkat literasi keagamaan siswa. Artinya, semakin tidak sejahtera guru, semakin rendah pula kemampuan siswa dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama.

Selain itu, krisis keteladanan (uswah) menjadi masalah serius. Guru PAI seharusnya menjadi model perilaku Islami bagi siswa. Namun, ketika guru datang ke sekolah dengan wajah lesu, sering mengeluh tentang masalah keuangan, atau bahkan terlihat tidak fokus karena memikirkan utang, maka pesan moral yang disampaikan di kelas kehilangan otoritasnya. Hapsari (2024) mencatat bahwa motivasi belajar siswa menurun drastis ketika mereka merasakan gurunya tidak bahagia atau tidak sungguh-sungguh dalam mengajar. Dalam perspektif pendidikan Islam, uswah adalah metode utama transfer nilai; tanpa keteladanan yang otentik, internalisasi akhlak tidak akan pernah optimal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan guru berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas pembelajaran, terutama dalam aspek inovasi pedagogis dan interaksi edukatif di kelas.

### **3. Ancaman terhadap Hifz ad-Din dan Hifz an-Nasl**

Dalam bingkai Maqasid Syariah, implikasi terhadap mutu pendidikan merupakan ancaman langsung terhadap dua pilar daruriyyat tertinggi: perlindungan agama (hifz ad-din) dan perlindungan keturunan (hifz an-nasl).

Guru PAI adalah garda terdepan dalam menjaga kemurnian transmisi ajaran Islam. Jika mereka bekerja dalam kondisi tertekan, maka proses tabligh (penyampaian) dan tarbiyah (pendidikan karakter) berjalan secara cacat. Pesan-pesan agama yang disampaikan menjadi kering, formalistis, dan kehilangan ruh spiritualitas. Akibatnya, siswa gagal menginternalisasi nilai-nilai keislaman dengan mendalam; mereka mungkin mampu menghafal dalil atau mengerjakan soal ujian, tetapi tidak menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk kegagalan hifz ad-din di tingkat institusional.

Lebih jauh, jika kualitas pendidikan agama buruk, maka generasi muda akan tumbuh tanpa fondasi moral yang kuat. Kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan krisis identitas keagamaan adalah gejala dari gagalnya hifz an-nasl (perlindungan keturunan). Setiani & Wakinah (2025) menegaskan bahwa karakter siswa adalah cerminan dari kesejahteraan gurunya; sekolah yang tidak peduli pada kesejahteraan pendidiknya tidak akan pernah mampu mencetak generasi yang unggul secara moral. Dengan demikian, memperbaiki kesejahteraan guru PAI bukanlah pilihan, melainkan kewajiban syar'i dan nasional.

### **4. Formulasi Solusi Kebijakan: Integrasi TQM, Herzberg, dan Maqasid Syariah**

Berdasarkan integrasi Teori Herzberg, Maqasid Syariah, dan TQM, penelitian ini mengusulkan model konseptual kesejahteraan guru PAI yang mencakup tiga komponen utama: (1) pemenuhan kebutuhan dasar (hygiene factors), (2) penguatan motivasi intrinsik (motivator factors), dan

(3) dukungan sistemik berbasis manajemen mutu berkelanjutan.

Total Quality Management (TQM) menawarkan kerangka solusi yang berpusat pada continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) dan total involvement (keterlibatan total). Dalam konteks guru PAI, solusi tidak boleh bersifat insidental (misalnya bantuan sembako atau tunjangan hari raya sesekali), melainkan harus berupa reformasi sistemik yang berkelanjutan.

Pertama, penyederhanaan birokrasi dan beban administrasi. Pemerintah (Kemenag dan Kemendikbudristek) perlu melakukan simplifikasi dokumen kurikulum. Tidak perlu guru membuat puluhan halaman modul ajar jika esensinya dapat dirangkum dalam satu lembar. Teknologi digital seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Sistem yang ramah pengguna (user-friendly) dan pelatihan teknis yang memadai harus menjadi prioritas (Mulyasa, 2024; Priyono, 2024).

Kedua, standarisasi upah layak bagi guru non-ASN. Pemerintah daerah bersama pusat harus menetapkan upah minimum bagi guru honorer yang mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) setempat, bukan sekadar UMR yang seringkali masih belum cukup. Martini (2025) merekomendasikan adanya subsidi silang dari sekolah negeri ke swasta, atau pembentukan dana abadi kesejahteraan guru yang dikelola oleh Kemenag.

Ketiga, akses yang adil terhadap sertifikasi dan pengembangan profesi. Jalur PPG harus dibuka lebih lebar, dengan biaya yang ditanggung negara sepenuhnya untuk guru honorer (Wahyuni, 2026). Selain itu, pelatihan berkelanjutan (continuous professional development) harus dirancang secara fleksibel, misalnya melalui kombinasi daring dan luring, serta memberikan insentif bagi peserta.

## 5. Pemenuhan Faktor Motivator (Herzberg) melalui Kepemimpinan Visioner

TQM menekankan bahwa mutu tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan total seluruh elemen sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin visioner harus berperan sebagai pelayan (servant leader) bagi guru. Dalam praktiknya, ini berarti:

- Memberikan pengakuan (recognition) secara rutin terhadap prestasi guru PAI, baik melalui penghargaan formal maupun sekadar apresiasi lisan yang tulus.
- Memberikan tanggung jawab yang bermakna, seperti melibatkan guru dalam pengambilan keputusan kurikulum atau perancangan program karakter sekolah.
- Menciptakan lingkungan kerja yang suportif, misalnya dengan menyediakan ruang istirahat yang nyaman, konseling psikologis gratis, serta fleksibilitas jam kerja untuk urusan keluarga.

Herzberg menyebut faktor-faktor ini sebagai motivator faktor intrinsik yang benar-benar mendorong guru untuk melampaui standar minimal. Ketika guru merasa dihargai dan dipercaya, mereka akan memiliki dorongan internal untuk berinovasi dan menjadi teladan yang baik. Dengan kata lain, kesejahteraan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal martabat dan otonomi profesional.

## 6. Peran Filantropi Islam: Zakat dan Wakaf untuk Kesejahteraan Guru

Dalam perspektif Maqasid Syariah, negara tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat sipil, khususnya lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan pengelola wakaf produktif, memiliki

tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam menyejahterakan guru PAI. Umam (2023) mengusulkan model wakaf produktif di mana aset wakaf dikelola secara profesional dan hasilnya dialokasikan untuk gaji guru PAI di madrasah swasta dan sekolah terpencil. Demikian pula, dana zakat dapat digunakan untuk program cash transfer bersyarat bagi guru honorer, atau untuk memberikan pelatihan gratis.

Langkah ini tidak hanya meringankan beban negara, tetapi juga mengembalikan semangat gotong royong dan kepedulian umat terhadap pendidik sebagai pewaris para nabi. Dalam kaidah fikih, "at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa" (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Jika negara lalai, maka umat harus bergerak.

Rekomendasi kebijakan konkret meliputi: (a) Pemerintah (Kemenag & Kemendikbudristek): percepatan sertifikasi PPG, standar upah layak bagi guru non-ASN, simplifikasi administrasi digital; (b) Lembaga Pendidikan: penerapan TQM dengan lingkungan suportif, pengakuan prestasi, perhatian kesehatan mental; (c) Masyarakat dan Filantropi: keterlibatan zakat/wakaf (BAZNAS) untuk intervensi kesejahteraan guru di daerah terpencil.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan profesional yang saling berkaitan. Hal ini sejalan dengan pendekatan multidimensi dalam manajemen pendidikan modern. Pendekatan Maqasid Syariah dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pendekatan normatif semata, tetapi sebagai kerangka etis yang melengkapi analisis ilmiah dalam memahami kesejahteraan guru sebagai bagian dari sistem pendidikan yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan guru PAI di Indonesia masih mengalami defisit sistemik, terutama pada aspek finansial dan psikologis, yang tercermin dalam fenomena prekariat, beban administrasi berlebih, dan digital burnout. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan mutu pendidikan, seperti melemahnya inovasi pembelajaran, krisis keteladanan (uswah), serta ancaman terhadap perlindungan agama (hifz ad-din) dan generasi (hifz an-nasl).

Sebagai solusi, diperlukan kebijakan integratif dan berkelanjutan yang meliputi standarisasi upah layak, penyederhanaan beban administrasi, peningkatan akses pengembangan profesional, serta penerapan prinsip TQM dan dukungan filantropi Islam. Dengan demikian, kesejahteraan guru PAI harus dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjaga moralitas generasi bangsa.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa model integratif yang menggabungkan perspektif manajemen modern dan nilai-nilai Islam dalam analisis kesejahteraan guru.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan guru yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model konseptual ini melalui pendekatan empiris, baik kuantitatif maupun mixed methods, guna memperoleh validasi yang lebih kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agbeyinka, I. (2025). Welfare package and job satisfaction among teachers: A comparative study. *J-MACC: Journal*

- of Management and Accounting, 8(1), 45–58.
- Alhafiz, M. R. (2025). Pemetaan karakteristik siswa oleh guru agama dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogi Agama*, 12(2), 110–125.
- Aulia, F., dkk. (2025). Kelemahan pelaksanaan PAI: Dampak kurangnya guru kompeten dan kesejahteraan rendah. *Mesada: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 22–35.
- Daryanto. (2023). Standar kompetensi dan sertifikasi guru. *Gava Media*.
- Fauzi, A. (2024). Analisis kebijakan tunjangan kinerja guru PAI terhadap produktivitas kerja. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 6(3), 201–215.
- Grove, S. (2024). Mental health and supportive learning environments: The role of teacher well-being. *International Journal of Educational Psychology*, 13(1), 88–102.
- Hapsari, D. (2024). Motivasi belajar siswa di tengah krisis pengajar agama di sekolah umum. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 11(4), 312–325.
- Hasanah, U., & Zainuddin. (2024). Problematika kesejahteraan guru honorer dan implikasinya terhadap kinerja pedagogik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 145–160.
- Hidayatulloh, M. (2024). Pelatihan profesional berbasis kesejahteraan: Studi kasus guru PAI di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 14(1), 55–70.
- Hutasuhut, R., dkk. (2025). Teacher welfare management and student literacy: A correlational study. *International Journal of Education Research*, 10(2), 154–168.
- Ibrahim, K. (2025). Relationship between salary payments and teacher retention in private schools. *Educational Management Administration & Leadership*, 53(1), 40–55.
- Ilmiyah, N., dkk. (2021). Problematika pembelajaran PAI di daerah terpencil: Studi kesejahteraan dan aksesibilitas. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 89–104.
- Iskandar, D. (2023). Kebutuhan sosial dan psikologis guru PAI dalam menghadapi perubahan kurikulum. *Jurnal Konseling Pendidikan*, 7(2), 120–134.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah.
- Lestari, P. (2024). Work-life balance guru PAI honorer: Antara pengabdian dan tuntutan ekonomi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(3), 210–225.
- Martini, R. (2025). Analisis data insentif guru agama non-ASN: Evaluasi kebijakan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 11(1), 77–92.
- Maulana, M. F. (2022). Dampak kesejahteraan guru PAI terhadap kompetensi profesional di madrasah. *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 6(1), 33–48.
- Mulyasa, E. (2022). Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan. *Remaja Rosdakarya*.
- Mulyasa, E. (2024). Manajemen kurikulum merdeka dan beban kerja guru: Tantangan masa depan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 15(2), 188–203.
- Mustaqim, A. (2025). Tantangan diferensiasi pembelajaran PAI di

- tengah keterbatasan fasilitas. *Jurnal Riset Pendidikan Agama*, 9(1), 66–81.
- Nafiah, A. (2023). Problematika guru PAI dalam implementasi kurikulum merdeka [Skripsi/Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya]. Digital Library UINSA.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Priyono, H. (2024). Profesionalisme guru di era disrupsi digital: Tuntutan vs realitas kesejahteraan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 12(3), 301–315.
- Rahman, A. (2025). Digital burnout pada guru PAI di perkotaan: Studi fenomenologi. *Jurnal Kesehatan Mental Pendidikan*, 4(2), 144–159.
- Ramayulis. (2022). Metodologi pendidikan agama Islam. *Kalam Mulia*.
- Ramayulis. (2024). Rekonstruksi kurikulum PAI masa depan: Integrasi sains dan agama. *Jurnal Pendidikan Islam Terpadu*, 8(1), 10–25.
- Saidah, A. F., & Sholikah, N. M. (2026). Fenomena kesejahteraan guru agama rendah dalam perspektif maqasid syari'ah. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa PAI*, 5(1), 1–18.
- Sari, M. A., dkk. (2024). Dampak kesejahteraan finansial terhadap motivasi mengajar guru di sekolah swasta. *Future Academia: Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 123–138.
- Setiani, L., & Wakinah. (2025). Strategi motivasi guru dalam meningkatkan literasi keagamaan siswa. *Jurnal Literasi Pendidikan*, 6(1), 45–60.
- Surya, E. (2025). Kesejahteraan guru dan kualitas karakter siswa: Analisis dampak hidden curriculum. *Jurnal Etika dan Moralitas*, 7(2), 190–205.
- Tafsir, A. (2021). Filsafat pendidikan islami. Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2023). 12 Permasalahan fundamental pendidikan agama Islam di sekolah. *Jurnal Pemikiran Islam (Repost Edition)*, 10(1), 5–20.
- Umam, K. (2023). Evaluasi kesejahteraan guru di sekolah swasta berbasis wakaf produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pendidikan*, 4(4), 332–347.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudin, D. (2021). Pengaruh tingkat kesejahteraan dan beban kerja terhadap kinerja guru PAI. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 112–127.
- Wahyuni, S. (2026). Dampak sertifikasi terhadap etos kerja guru PAI: Studi longitudinal. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 14(1), 88–103.
- Zuhri, M. (2026). Implementasi keadilan upah dalam pendidikan Islam: Tinjauan fikih ijarah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(1), 21–36.